

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Clinard, Marshall B., & Richard Quinney. *Criminal Behavior Systems: A Typology*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1967.
- Lemert, Edwin M. *Social Pathology: A Systematic Approach to the Theory of Sociopathic Behavior*. New York: McGraw-Hill, 1951.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- Purnianti, Ida. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- Roeslan Saleh. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Soerjono Soekanto. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Jurnal

- Alfianto, M. . “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Perma RI No. 13 Tahun 2016.” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 2022.
- Djamil, M. . “Trading in Influence: Modus Baru dalam Korupsi Indonesia Tahun 2022 dan Paradoks Kriminalisasi.” *Jurnal Integritas KPK*, 2023.
- Ferdinad, Adam Khafi & Sunarto DM. “Penegakan Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh KPPU dan KPK.” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2020.
- Marcelino, Y., dkk.. “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Studi di Kota Makassar.” *Jurnal Antikorupsi*, 2022.
- Saraya & Handayani. “Penegakan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Keterbukaan Informasi Publik.” *Jurnal Ilmu Hukum Kontemporer*, 2024.
- Suardi, M., dkk.. “Kerentanan Tahap Persiapan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC 2003.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD.

Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2019 tentang Larangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Pengendalian Gratifikasi.

Putusan Peradilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1153 K/PID.SUS/2017.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1500 K/Pid.Sus/2024.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4309 K/Pid.Sus/2023.